AL MUFID
Jurnal Pengabdian dan Pemberdayaan Masyarakat

Literasi Digital Berbasis Nilai Al-Qur'an Untuk Etika Bermedia Sosial Mahasiswi Generasi-Z STIT Darul Fattah Lampung

Kasmudi
STIT Darul Fattah Bandar Lampung
kasmudi84@gmail.com

ABSTRACT

Social media use among Generation Z requires both information evaluation skills and ethical awareness. This community engagement program is designed to strengthen Qur'an-based digital literacy among female students of the Islamic Elementary Teacher Education, program at Institut Agama Islam Darul Fattah Lampung. Participatory Action Research (PAR) positions participants as active partners in problem identification, planning, action, observation, and reflection. The proposed schedule of 7-28 September 2020 includes participatory discussions, news verification exercises, respectful communication simulations, collaborative development of digital ethics guidelines, and joint evaluation. Indicators include information verification (tabayyun), evidence evaluation, respectful responses, and privacy protection. Intended outputs include digital ethics guidelines and peer mentoring. Empirical outcomes remain unreported because activity records have not been provided. The model connects digital competencies with the moral responsibilities of prospective teachers.

Keyword: *Digital literacy; Qur'an; social media ethics; Generation Z; PAR.*

ABSTRAK

Penggunaan media sosial di kalangan Generasi Z menuntut kecakapan menilai informasi sekaligus kesadaran etis dalam berkomunikasi. Program pengabdian kepada masyarakat ini dirancang untuk memperkuat literasi digital berbasis nilai-nilai Al-Qur'an pada mahasiswi Pendidikan Guru Madrasah Ibtidaiyah, STIT Darul Fattah Lampung. Pendekatan Participatory Action Research (PAR) menempatkan peserta sebagai mitra aktif dalam pemetaan masalah, perencanaan, aksi, observasi, dan refleksi. Rangkaian pendampingan dirancang pada 7-28 September 2020 melalui diskusi partisipatif, latihan verifikasi berita, simulasi komunikasi santun, penyusunan pedoman etika digital, dan evaluasi bersama. Indikator keberhasilan mencakup kemampuan melakukan tabayyun, menilai bukti, menyusun tanggapan santun, serta menjaga privasi. Luaran yang ditargetkan berupa pedoman etika digital dan mekanisme pendampingan sebaya. Hasil empiris belum dapat dilaporkan karena dokumentasi kegiatan belum tersedia. Model ini menawarkan kerangka pemberdayaan yang menghubungkan kecakapan digital dengan tanggung jawab moral calon pendidik.

Kata kunci: *Literasi digital; Al-Qur'an; etika media sosial; Generasi Z; PAR.*

PENDAHULUAN

Perkembangan teknologi komunikasi telah mengubah cara mahasiswa mengakses pengetahuan, membangun relasi, dan berpartisipasi dalam kehidupan sosial. Media sosial bukan semata saluran distribusi informasi, melainkan ruang interaksi yang membentuk identitas dan kebiasaan komunikasi (boyd, 2014; Nasrullah, 2015). Pada masa pandemi COVID-19 tahun 2020, kebutuhan komunikasi dan pembelajaran jarak jauh menjadikan kemampuan mengelola informasi digital semakin penting. Namun, intensitas penggunaan perangkat tidak dengan sendirinya menjamin kemampuan menilai kredibilitas sumber atau mempertimbangkan konsekuensi suatu unggahan.

Literasi digital mencakup kecakapan memahami dan menggunakan informasi dalam berbagai format (Gilster, 1997). Eshet-Alkalai (2004) menempatkan kemampuan kognitif dan sosial-emosional sebagai bagian penting dari literasi tersebut, sedangkan Ng (2012) menekankan keterkaitan dimensi teknis, kognitif, dan sosial-emosional. Keterampilan mengoperasikan aplikasi perlu diimbangi dengan kemampuan mengevaluasi informasi, berkomunikasi, dan menjaga keamanan diri. Perspektif ini sejalan dengan kerangka kompetensi digital yang dikembangkan Law et al. (2018) dan Vuorikari et al. (2016).

Persoalan misinformasi dan disinformasi memperlihatkan bahwa informasi yang menarik perhatian belum tentu benar. Wardle dan Derakhshan (2017) membedakan informasi keliru berdasarkan unsur kesengajaan dan potensi kerugian. Penelitian Vosoughi et al. (2018) mengenai penyebaran berita di Twitter memperlihatkan pentingnya memahami dinamika penyebaran informasi palsu. Dalam konteks pendidikan, evaluasi sumber perlu dilatih secara eksplisit, misalnya dengan membandingkan informasi lintas situs dan menelusuri sumber awal (McGrew et al., 2018; Wineburg & McGrew, 2019).

Di Indonesia, pemetaan Kurnia dan Astuti (2017) menunjukkan peran penting perguruan tinggi dalam gerakan literasi digital dan perlunya kegiatan yang lebih memberdayakan. Materi pendukung literasi digital dari Nasrullah et al. (2017) juga menempatkan sekolah, keluarga, dan masyarakat sebagai lingkungan pengembangan kecakapan. Kegiatan literasi perlu disesuaikan dengan praktik komunikasi

mahasiswa, bukan sekadar penyampaian definisi (Jordana & Suwarto, 2017; Astuti, 2017).

Al-Qur'an menyediakan landasan normatif bagi komunikasi yang bertanggung jawab. QS. Al-Hujurat [49]: 6 mengarahkan kehati-hatian dalam menerima berita; QS. Al-Isra' [17]: 36 menegaskan tanggung jawab terhadap sesuatu yang tidak diketahui; QS. Al-Hujurat [49]: 11–12 mengingatkan agar tidak merendahkan, berprasangka buruk, atau menggunjing orang lain. QS. Al-Ahzab [33]: 70 memuat prinsip perkataan yang benar. Penjelasan ayat dapat diperdalam melalui tafsir Shihab (2002) dan Kementerian Agama RI (2019). Fatwa MUI Nomor 24 Tahun 2017 memberi pedoman yang lebih spesifik mengenai bermuamalah melalui media sosial.

Mahasiswi PGMI merupakan kelompok sasaran strategis karena calon guru madrasah ibtidaiyah kelak menjadi teladan bagi anak dan berinteraksi dengan orang tua melalui berbagai saluran komunikasi. Literasi digital yang berlandaskan nilai keislaman dapat menjadi bekal profesional, bukan hanya kompetensi personal. Akan tetapi, kondisi awal kelompok sasaran dan kebutuhan prioritas tidak boleh diasumsikan sebagai temuan lapangan sebelum dipetakan bersama mitra. Program ini dirancang agar mahasiswi menentukan persoalan yang relevan dengan pengalaman mereka sendiri.

Kebaruan praktis program terletak pada penerjemahan nilai Qur'ani ke dalam tindakan digital yang dapat diamati, disertai pengambilan keputusan bersama dan siklus perbaikan. Pendekatan ini berbeda dari sosialisasi satu arah karena peserta ikut mengembangkan solusi, menguji pedoman, dan menilai manfaatnya. Tujuannya adalah memperkuat kemampuan verifikasi informasi, membiasakan komunikasi santun, menjaga privasi dan martabat orang lain, serta membangun mekanisme dukungan sebaya yang dapat dilanjutkan oleh komunitas PGMI.

Literasi digital sebagai kompetensi kritis dan sosial

Literasi digital tidak dapat dibatasi pada kemampuan mengakses perangkat dan mengoperasikan aplikasi. Dalam kehidupan mahasiswa, akses terhadap informasi perlu disertai kemampuan menentukan tujuan pencarian, menyeleksi sumber, memahami isi, dan mempertimbangkan manfaat informasi tersebut. Lankshear dan Knobel (2008) memandang literasi digital sebagai praktik yang terkait dengan konteks sosial dan budaya. Oleh karena itu, program pengabdian perlu memperhatikan pengalaman peserta dalam lingkungan perkuliahan, keluarga, serta

komunitas keagamaan. Pesan yang dianggap wajar dalam satu kelompok belum tentu sesuai untuk disebarkan kepada kelompok lain. Kesadaran terhadap perbedaan audiens menjadi bagian penting dari kecakapan komunikasi.

Kerangka DigComp 2.0 mengelompokkan kompetensi digital ke dalam ranah informasi dan data, komunikasi dan kolaborasi, penciptaan konten, keamanan, serta pemecahan masalah (Vuorikari et al., 2016). Kerangka UNESCO juga memberi perhatian pada kemampuan yang diperlukan untuk menggunakan teknologi secara bermakna (Law et al., 2018). Dalam program ini, kelima ranah tersebut dapat diterjemahkan menjadi kegiatan sederhana, seperti mengecek asal sebuah pesan, berdiskusi tanpa menyerang pribadi, memproduksi konten edukatif, melindungi data pribadi, dan mencari solusi ketika terjadi kesalahpahaman. Penguasaan teknologi dengan demikian ditempatkan sebagai sarana untuk meningkatkan kualitas hubungan sosial, bukan sebagai tujuan tunggal.

Kegiatan literasi digital yang berorientasi pada pemberdayaan perlu menyediakan ruang bagi peserta untuk mengenali persoalan yang mereka alami sendiri. Kajian gerakan literasi digital di lingkungan perguruan tinggi menunjukkan bahwa kampus dapat menjadi ruang pengembangan kolaborasi dalam pendidikan literasi (Jordana & Suwarto, 2017). Mahasiswi PGMI dapat mengembangkan kemampuan tersebut melalui komunitas kelas dan organisasi kemahasiswaan. Namun, program hendaknya tidak mengasumsikan bahwa seluruh peserta mempunyai akses perangkat, waktu, dan pengalaman yang sama. Penyediaan materi ringkas, latihan yang dapat dikerjakan tanpa koneksi terus-menerus, dan pilihan bentuk partisipasi menjadi bagian dari rancangan yang inklusif.

Etika komunikasi Qur'ani dalam konteks pendidikan calon guru

Prinsip tabayyun dalam QS. Al-Hujurat [49]: 6 memiliki relevansi dengan tanggung jawab manusia ketika menerima suatu kabar. Dalam konteks tafsir, kehati-hatian terhadap berita berkaitan dengan pencegahan tindakan yang merugikan pihak lain akibat ketidaktahuan (Shihab, 2002). Penerapannya dalam ruang digital dapat berupa penundaan penyebaran pesan sampai sumber dan konteksnya dipahami. Tabayyun bukan sekadar kebiasaan mencari pembenaran atas keyakinan pribadi, tetapi kesediaan untuk mengoreksi pemahaman ketika bukti tidak mendukung klaim awal. Peserta juga perlu memahami bahwa tidak semua informasi dapat diverifikasi

secara tuntas; dalam keadaan tersebut, tidak meneruskan informasi merupakan pilihan yang bertanggung jawab.

QS. Al-Ahzab [33]: 70 mengandung perintah untuk menyampaikan perkataan yang benar. Dalam aktivitas digital, prinsip ini dapat diterjemahkan menjadi kejujuran dalam menulis keterangan foto, membedakan fakta dan pendapat, serta menghindari judul yang menyesatkan. Adapun QS. Al-Hujurat [49]: 11–12 memberi landasan untuk menjaga martabat manusia melalui larangan merendahkan, berprasangka buruk, mencari-cari kesalahan, dan menggunjing. Pemaknaan tersebut selaras dengan orientasi Fatwa Majelis Ulama Indonesia Nomor 24 Tahun 2017 mengenai pedoman bermuamalah melalui media sosial (Majelis Ulama Indonesia, 2017). Prinsip keagamaan perlu diterapkan secara konsisten, termasuk ketika berhadapan dengan orang yang berbeda pandangan.

Calon guru madrasah ibtidaiyah memiliki tanggung jawab yang melampaui kepentingan pribadi. Mereka kelak dapat menggunakan media digital untuk berkomunikasi dengan wali murid, berbagi materi, dan mendokumentasikan kegiatan pembelajaran. Kebiasaan mengunggah informasi tanpa mempertimbangkan persetujuan dapat menimbulkan persoalan privasi anak. Kajian mengenai mediasi penggunaan internet dalam keluarga memperlihatkan pentingnya peran pendampingan orang dewasa dalam keselamatan digital (Widiyastuti, 2017). Karena itu, materi etika digital untuk calon guru perlu mencakup tanggung jawab dalam mengelola data peserta didik serta cara berkomunikasi yang tidak menimbulkan stigma terhadap anak maupun keluarganya.

METODE PELAKSANAAN

Metode pengabdian yang digunakan adalah Participatory Action Research (PAR), yaitu pendekatan kolaboratif yang menghubungkan produksi pengetahuan, tindakan perubahan, dan refleksi bersama komunitas. PAR menekankan keterlibatan pihak yang mengalami masalah dalam menentukan agenda dan menilai hasil tindakan (Baum et al., 2006; Reason & Bradbury, 2008). Dalam kerangka pemberdayaan, peserta tidak diposisikan sebagai objek penerima ceramah, melainkan sebagai subjek yang memiliki pengalaman dan kemampuan mengembangkan solusi (Freire, 1970; Fals-Borda & Rahman, 1991).

Siklus kegiatan mengadaptasi perencanaan, tindakan, observasi, dan refleksi yang dapat berulang sesuai kebutuhan (Kemmis et al., 2014; McIntyre, 2008; Stringer, 2014). Pemetaan partisipatif dilakukan sebelum siklus pertama untuk menghindari penetapan masalah secara sepihak. Teknik dialog dan pemetaan prioritas mengacu pada prinsip pembelajaran partisipatif Chambers (1997). Tim pengabdi berperan sebagai fasilitator, sedangkan peserta menentukan masalah, memilih kasus latihan, memberi masukan atas materi, dan menyepakati tindak lanjut.

Prinsip pemberdayaan dan pembagian peran dalam PAR

PAR berangkat dari pandangan bahwa pengetahuan mengenai masalah sosial bukan semata-mata milik ahli atau fasilitator. Fals-Borda dan Rahman (1991) menekankan hubungan antara pengetahuan partisipatif dan tindakan perubahan. Freire (1970) juga memberikan dasar bagi pendidikan dialogis yang tidak memosisikan peserta sebagai penerima pengetahuan pasif. Dalam konteks program ini, dialog dapat dimulai dari pengalaman konkret mahasiswi, kemudian dihubungkan dengan konsep literasi digital dan nilai Al-Qur'an. Fasilitator berkewajiban memastikan bahwa diskusi menghasilkan pilihan tindakan yang benar-benar dapat dilakukan oleh peserta dalam kehidupan sehari-hari.

Pembagian peran dirancang secara kolaboratif. Tim pengabdi menyediakan bahan bacaan, memandu dialog, dan membantu menyusun instrumen evaluasi. Peserta mengidentifikasi masalah, menentukan prioritas, menguji langkah verifikasi, serta memberi penilaian terhadap kelayakan pedoman yang dirumuskan. Pengelola program studi dapat memfasilitasi komunikasi dan mendukung tindak lanjut apabila menyetujui kegiatan tersebut. Dalam kemitraan berbasis komunitas, perhatian terhadap pembagian kuasa, manfaat bersama, dan keberlanjutan merupakan unsur penting (Israel et al., 1998). Oleh sebab itu, keputusan mengenai publikasi hasil dan dokumentasi perlu dibicarakan bersama, bukan ditetapkan secara sepihak.

Partisipasi tidak cukup diukur menggunakan daftar hadir. Keterlibatan substantif dapat dikenali dari usulan yang diajukan peserta, alasan pemilihan prioritas, perubahan materi yang dihasilkan melalui refleksi, serta keterlibatan dalam penilaian luaran. Catatan keputusan perlu menyimpan hubungan antara masukan peserta dan tindakan yang dipilih. Jika peserta tidak memperoleh ruang untuk mengubah agenda atau menilai tindakan, kegiatan lebih tepat dipahami sebagai pelatihan biasa daripada PAR yang utuh. Penjelasan mengenai kualitas

partisipasi ini diperlukan agar pemilihan metode konsisten dengan praktik pengabdian.

Mitra, waktu, dan media pelaksanaan

Mitra sasaran adalah mahasiswi Program Studi PGMI Institut Agama Islam Darul Fattah Lampung. Jumlah peserta, semester, penanggung jawab, dan nama institusi pada tahun 2020 perlu dikonfirmasi melalui daftar hadir dan surat tugas. Jadwal berikut merupakan usulan penataan kegiatan pada September 2020. Mengingat konteks pandemi, moda daring melalui WhatsApp dan pertemuan video diusulkan; moda yang benar-benar digunakan harus dicocokkan dengan dokumentasi.

Tanggal (usulan)	**Tahapan PAR**	**Aktivitas**
7 September 2020	Pemetaan dan perencanaan	Dialog kebutuhan, pemetaan masalah, asesmen awal.
14 September 2020	Aksi I dan observasi	Materi Qur'ani, latihan tabayyun, simulasi kasus.
21 September 2020	Refleksi dan aksi II	Evaluasi kendala, perbaikan latihan, penyusunan pedoman.
28 September 2020	Observasi dan refleksi akhir	Asesmen akhir, penilaian karya, rencana pendampingan sebaya.

Tahapan operasional

Pemetaan dan perencanaan (plan). Fasilitator mengajak peserta mendiskusikan pengalaman menerima berita berantai, perbedaan pendapat di grup, serta penyebaran foto atau data pribadi. Peserta menyusun daftar masalah secara anonim, mengelompokkan persoalan dan menentukan prioritas melalui musyawarah. Indikator keberhasilan dan aturan kerahasiaan disepakati sejak awal. Asesmen diagnostik digunakan untuk mengetahui kebutuhan belajar, bukan untuk memberi label pada peserta.

Aksi I (action). Peserta dan fasilitator mengaitkan prinsip tabayyun, qaulan sadidan, penghormatan martabat, dan kehati-hatian dengan contoh pesan sehari-hari. Kelompok memeriksa sumber, tanggal, konteks, dan bukti pendukung dari

contoh informasi yang telah dianonimkan. Peserta kemudian menyusun tanggapan yang tidak mempermalukan pengirim. Latihan menggunakan pengalaman langsung dan refleksi sebagai bagian dari proses belajar (Kolb, 1984).

Observasi dan refleksi I (observe–reflect). Peserta bersama fasilitator meninjau hasil latihan, mencatat kesulitan, dan mengidentifikasi strategi yang dapat diterapkan dalam grup perkuliahan. Bila kesulitan utama berada pada pemeriksaan sumber, siklus berikutnya memperbanyak latihan penelusuran bukti; bila kesulitan berada pada komunikasi, latihan difokuskan pada penyusunan respons tanpa serangan pribadi. Keputusan perubahan materi dicatat dalam berita acara refleksi.

Aksi II dan refleksi akhir. Peserta menyusun pedoman etika digital secara kolaboratif, mengujinya melalui skenario baru, dan memberi umpan balik antarkelompok. Pedoman diperbaiki berdasarkan pengalaman penggunaan, bukan hanya berdasarkan penilaian fasilitator. Pada akhir siklus, peserta bersama tim menyepakati bentuk pendampingan sebaya dan mekanisme pengingat etika dalam komunitas.

Rancangan materi dan mekanisme refleksi setiap siklus

Materi siklus pertama diusulkan berfokus pada identifikasi informasi bermasalah dan praktik tabayyun. Fasilitator dapat menyediakan pesan simulasi yang tidak memuat identitas orang nyata. Peserta bekerja dalam kelompok kecil untuk membedakan klaim utama, bukti, opini, serta bagian yang tidak dapat dipastikan. Setiap kelompok menjelaskan alasan keputusannya dan memperoleh tanggapan dari kelompok lain. Penggunaan pengalaman konkret, refleksi, pembentukan konsep, dan percobaan tindakan sesuai dengan orientasi pembelajaran berbasis pengalaman (Kolb, 1984). Kegiatan tidak berhenti pada penjelasan ayat, tetapi memberi kesempatan untuk menguji penerapan nilai tersebut.

Pada akhir siklus pertama, refleksi diarahkan pada pertanyaan mengenai apa yang berhasil, apa yang sulit, mengapa kesulitan muncul, dan bagaimana strategi perlu diperbaiki. Refleksi dapat menghasilkan keputusan untuk menyederhanakan daftar pemeriksaan informasi atau memperbanyak latihan komunikasi santun. Keputusan tersebut perlu dicatat bersama alasan dan pihak yang mengusulkannya. Siklus kedua kemudian dirancang untuk menguji perbaikan yang telah disepakati. Dengan demikian, hubungan antara kedua siklus tidak sekadar berupa pengulangan

materi, tetapi perubahan tindakan berdasarkan pengalaman sebelumnya (Kemmis et al., 2014; McIntyre, 2008).

Materi siklus kedua diusulkan mencakup pembuatan pedoman etika digital, latihan memberikan koreksi secara pribadi, dan penyusunan konten edukasi singkat. Peserta menilai apakah pedoman mudah dipahami, realistis diterapkan, serta selaras dengan prinsip Qur'ani. Jika muncul perbedaan penafsiran mengenai suatu tindakan, fasilitator membantu peserta membedakan persoalan fakta, pertimbangan etis, dan kebutuhan menjaga hubungan sosial. Hasil refleksi akhir dapat menjadi dasar bagi komunitas untuk menentukan apakah pendampingan tambahan dibutuhkan.

Evaluasi partisipatif dan etika kegiatan

Evaluasi dirancang menggunakan asesmen berbasis kasus sebelum dan setelah pendampingan, lembar observasi, hasil karya kelompok, serta catatan refleksi. Empat kompetensi dinilai menggunakan rubrik 0–3: 0 belum menunjukkan kompetensi, 1 menunjukkan sebagian dengan arahan, 2 mampu dengan sedikit arahan, dan 3 mampu mandiri disertai alasan. Skor maksimum 12. Data berpasangan digunakan hanya bagi peserta yang menyelesaikan kedua asesmen. Perubahan rerata skor, proporsi peserta yang memenuhi indikator, dan contoh perbaikan jawaban dapat dilaporkan secara deskriptif; tanpa kelompok pembanding, perubahan tidak dapat dinyatakan sebagai bukti kausal tunggal.

Analisis catatan refleksi dilakukan dengan mengelompokkan tema, menelaah pola, dan mengonfirmasi interpretasi kepada peserta (Braun & Clarke, 2006). Evaluasi proses menilai apakah peserta benar-benar berperan dalam pengambilan keputusan. Partisipasi bersifat sukarela; identitas, nomor telepon, isi percakapan pribadi, dan foto tidak dipublikasikan tanpa izin. Persetujuan penggunaan dokumentasi dibedakan dari persetujuan mengikuti kegiatan. Prinsip kemitraan dan pembagian tanggung jawab mengikuti orientasi penelitian partisipatif berbasis komunitas (Israel et al., 1998).

Instrumen pengumpulan bukti dan indikator perubahan

Asesmen berbasis kasus dirancang agar peserta tidak sekadar menghafal istilah. Pada kompetensi verifikasi, kasus dapat berupa pesan yang menyampaikan klaim tanpa rujukan. Peserta diminta menentukan langkah pemeriksaan dan menjelaskan alasan pemilihan sumber. Pada kompetensi komunikasi, peserta menyusun respons terhadap komentar yang merendahkan. Pada kompetensi privasi,

peserta menentukan tindakan sebelum membagikan foto teman. Pada kompetensi tanggung jawab, peserta menjelaskan kapan sebuah pesan sebaiknya tidak diteruskan. Kasus awal dan akhir sebaiknya berbeda dalam isi tetapi setara tingkat kesulitannya.

Lembar observasi dapat memuat tanggal kegiatan, kode kelompok, tindakan yang dilakukan, bukti yang digunakan, dan catatan fasilitator. Catatan refleksi peserta dapat menggunakan pertanyaan terbuka: kebiasaan apa yang ingin diubah, situasi apa yang masih sulit, dan dukungan apa yang dibutuhkan. Dokumen hasil karya kelompok dapat dinilai dari kejelasan pesan, ketepatan penerapan prinsip etis, kemudahan penggunaan, serta kesepakatan anggota. Instrumen tersebut merupakan rancangan; pengisian dan penilaian harus berasal dari dokumentasi kegiatan yang sebenarnya.

Analisis perubahan direncanakan dengan membandingkan skor peserta yang memiliki data awal dan akhir secara berpasangan. Jumlah peserta yang mengikuti kedua asesmen perlu disebutkan agar pembaca memahami cakupan evaluasi. Catatan peserta yang hanya mengikuti salah satu asesmen tetap dapat digunakan untuk menggambarkan proses, tetapi tidak digabungkan dalam perhitungan perubahan berpasangan. Data kualitatif dianalisis dengan mengidentifikasi tema, memeriksa kembali kecocokannya dengan catatan asli, dan mendiskusikan interpretasi dengan peserta (Braun & Clarke, 2006). Penggunaan beberapa jenis bukti memungkinkan evaluasi yang tidak hanya bergantung pada angka.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Pemetaan kebutuhan dan penguatan kesadaran kritis

Pemetaan kebutuhan dirancang untuk memperlihatkan perbedaan antara kemampuan menggunakan media sosial dan kemampuan menilai isi pesan. Prensky (2001) memperkenalkan istilah digital natives, tetapi Bennett et al. (2008) dan Helsper dan Eynon (2010) menunjukkan perlunya menghindari generalisasi bahwa semua individu muda memiliki kecakapan digital yang sama. Kemampuan mahasiswi perlu dinilai melalui praktik, bukan disimpulkan dari usia atau frekuensi penggunaan telepon pintar.

Hasil pemetaan awal melibatkan 40 mahasiswi Program Studi Pendidikan Guru Madrasah Ibtidaiyah (PGMI) Institut Agama Islam Darul Fattah Lampung.

Pemetaan diarahkan pada identifikasi permasalahan literasi digital, terutama kemampuan memverifikasi kebenaran informasi, memahami etika berkomunikasi di media sosial, mencegah penyebaran berita hoaks, serta mengimplementasikan nilai-nilai Al-Qur'an dalam aktivitas digital sehari-hari. Permasalahan tersebut menjadi fokus pendampingan karena intensitas penggunaan media sosial di kalangan Generasi Z perlu diimbangi dengan kemampuan berpikir kritis, kesadaran etis, dan tanggung jawab moral. Melalui dialog partisipatif dan diskusi bersama peserta, kebutuhan mitra dapat diidentifikasi secara lebih mendalam sebagai dasar penyusunan materi dan strategi pendampingan. Hasil pemetaan tersebut menjadi landasan dalam menentukan hubungan antara kebutuhan mitra dan tindakan yang dipilih pada siklus pertama pendekatan *Participatory Action Research* (PAR), khususnya melalui penguatan prinsip tabayyun, kejujuran, kesantunan berkomunikasi, dan tanggung jawab dalam bermedia sosial.

Integrasi nilai Al-Qur'an ke dalam praktik digital

Pendampingan mengoperasionalkan ayat-ayat Al-Qur'an sebagai pedoman perilaku yang dapat dilatih. Literasi informasi tidak hanya berhubungan dengan menemukan sumber, tetapi juga dengan memahami konteks dan menilai kualitas pesan (Koltay, 2011; Jones & Hafner, 2012). Nilai Qur'ani memperluas dimensi tersebut melalui tanggung jawab atas konsekuensi komunikasi terhadap orang lain.

Tabel 1. Nilai dan landasan

Nilai dan landasan	Praktik yang dilatih
Tabayyun - QS. Al-Hujurat [49]: 6	Menelusuri sumber pertama, memeriksa konteks, menahan pesan sebelum cukup bukti.
Tanggung jawab pengetahuan - QS. Al-Isra' [17]: 36	Membedakan fakta, pendapat, dan informasi yang belum dapat dipastikan.
Qaulan sadidan - QS. Al-Ahzab [33]: 70	Menyusun pesan yang benar, jelas, dan tidak memanipulasi fakta.
Penghormatan - QS. Al-Hujurat [49]: 11–12	Tidak mengejek, menggunjing, menyebarkan aib, atau mempermalukan.

Kesantunan - QS. An-Nahl [16]: 125	Menanggapi perbedaan dengan argumentasi yang bijaksana.
Privasi - QS. An-Nur [24]: 27–28	Meminta izin sebelum membagikan data atau foto pribadi (penerapan etis kontemporer).

Pemetaan terakhir merupakan analogi etis terhadap prinsip penghormatan ruang pribadi, bukan klaim bahwa ayat tersebut secara langsung membahas teknologi digital. Dengan cara ini, pembelajaran menjaga konteks ayat sekaligus menghubungkannya dengan persoalan aktual. Makmun et al. (2019) menawarkan konteks pendidikan yang relevan mengenai internalisasi etika media sosial melalui pendekatan saintifik.

Simulasi tabayyun dan komunikasi santun

Contoh latihan adalah pesan berantai mengenai informasi kesehatan tanpa sumber jelas. Peserta diminta mengidentifikasi klaim, mencari sumber resmi, membandingkan tanggal dan konteks, lalu menentukan apakah informasi layak diteruskan. Pada kasus lain, peserta menanggapi komentar yang merendahkan teman tanpa mengulang penghinaan. Latihan memadukan evaluasi informasi dengan keterampilan kewargaan digital (Ribble, 2015), serta kesadaran terhadap risiko penggunaan internet dalam kehidupan sosial (Widiyastuti, 2017).

Pembahasan kritis tentang hoaks dan kebiasaan berbagi informasi

Informasi yang beredar di media sosial sering kali menggunakan bahasa emosional, desakan untuk segera menyebarkan, atau pernyataan yang mengatasnamakan otoritas tertentu. Ciri tersebut dapat menjadi alasan untuk melakukan pemeriksaan lebih lanjut, tetapi bukan bukti tunggal bahwa pesan pasti salah. Kajian Astuti (2017) mengenai upaya generasi digital dalam menghadapi hoaks memperkuat relevansi kegiatan edukatif yang memberi ruang kreativitas. Dalam program ini, kreativitas dapat diarahkan pada penyusunan pesan koreksi yang jelas, singkat, dan dapat diterima oleh komunitas.

Strategi membaca lateral menawarkan cara untuk mengevaluasi sumber dengan meninggalkan halaman yang sedang dibaca dan membandingkannya dengan sumber independen (Wineburg & McGrew, 2019). Peserta dapat mencari identitas penerbit, memeriksa apakah informasi dilaporkan pihak lain yang kredibel, dan

menelusuri sumber asli. Proses tersebut berbeda dengan sekadar membaca seluruh isi sebuah unggahan. Dalam praktik tabayyun, pemeriksaan lateral dapat menjadi salah satu teknik operasional yang melengkapi pertimbangan etis. Apabila informasi tidak memiliki bukti yang cukup, peserta dapat menyatakan ketidakpastian tanpa mengubahnya menjadi tuduhan terhadap pengirim.

Pada konteks September 2020, penggunaan contoh pesan kesehatan relevan dengan situasi pandemi. Namun, contoh simulasi tidak boleh memuat klaim medis yang berpotensi menyesatkan tanpa penjelasan. Materi dapat berfokus pada pemeriksaan tanggal, institusi penerbit, dan kesesuaian konteks. Pembahasan ini menjelaskan rasionalitas rancangan, bukan bukti bahwa jenis pesan tertentu benar-benar ditemukan dalam grup mahasiswi PGMI. Untuk menyatakan pola empiris, pengabdi perlu mempunyai catatan pemetaan kebutuhan yang sah dan telah dianonimkan.

Pedoman etika digital dan pemberdayaan sebaya

Luaran yang diusulkan adalah pedoman ringkas yang disusun bersama peserta, dengan lima langkah sebelum membagikan konten: berhenti sejenak, periksa sumber, bandingkan bukti, pertimbangkan dampak, dan putuskan secara bertanggung jawab. Pedoman juga memuat cara mengoreksi informasi keliru tanpa mempermalukan pengirim serta ketentuan persetujuan sebelum menyebarkan dokumentasi orang lain. Karya kolaboratif ini dimaksudkan sebagai alat praktik sehari-hari, bukan sekadar poster informatif. Pengembangan literasi sebagai praktik sosial sejalan dengan Lankshear dan Knobel (2008).

Keberlanjutan dirancang melalui relawan sebaya, dengan tugas mengingatkan anggota grup secara santun, membuka diskusi singkat mengenai kasus yang relevan, serta merevisi pedoman jika ditemukan persoalan baru. Keanggotaan dan mandat relawan harus ditentukan dengan persetujuan peserta. Prinsip pemberdayaan menuntut agar komunitas memiliki kendali atas tindak lanjut, bukan bergantung terus-menerus pada tim pengabdi.

Penguatan budaya komunikasi dan perlindungan privasi

Etika digital juga berkaitan dengan cara seseorang menghadapi konflik. Koreksi yang faktual tetapi disampaikan melalui penghinaan dapat mengurangi kemungkinan dialog yang produktif. Peserta dapat berlatih memulai tanggapan dengan menyebutkan bagian informasi yang perlu diperiksa, menyertakan sumber

pendukung, dan menghindari pelabelan terhadap pribadi. Ketika konflik terkait dengan data atau pengalaman pribadi, komunikasi secara terbatas dapat menjadi pilihan yang lebih tepat daripada memperpanjang perdebatan di ruang publik. Prinsip kewargaan digital menempatkan tanggung jawab dan penghormatan terhadap pihak lain sebagai unsur penggunaan teknologi (Ribble, 2015).

Perlindungan privasi perlu dipahami sebagai praktik yang berlangsung sejak konten dibuat. Sebelum menyebarkan tangkapan layar percakapan, foto, atau dokumen, peserta dapat menilai apakah terdapat persetujuan, apakah penyebaran diperlukan, dan apakah identitas pihak lain dapat disamarkan. Untuk calon guru, prinsip ini dapat dikembangkan menjadi pedoman sederhana dalam mendokumentasikan pembelajaran. Foto siswa, hasil tugas, informasi kesehatan, dan identitas keluarga hendaknya tidak dibagikan tanpa dasar yang tepat. Pembiasaan tersebut memberi landasan bagi tanggung jawab profesional pada masa mendatang.

Karya edukatif kelompok dapat berupa poster digital, panduan singkat untuk anggota grup, atau skenario percakapan. Pemilihan bentuk karya sebaiknya ditentukan oleh peserta sesuai kebutuhan dan kemampuan mereka. Penilaian tidak hanya melihat kualitas visual, tetapi juga ketepatan isi dan manfaat bagi pengguna. Apabila pedoman sulit diterapkan, kelompok dapat mengubah susunan atau bahasanya setelah memperoleh umpan balik. Mekanisme tersebut merupakan contoh bagaimana tindakan kolektif dapat menghubungkan pengetahuan dengan perubahan praktik.

Evaluasi Capaian dan Refleksi Bersama

Evaluasi kegiatan pengabdian kepada masyarakat dirancang dengan melibatkan 40 mahasiswi Program Studi Pendidikan Guru Madrasah Ibtidaiyah (PGMI) Institut Agama Islam Darul Fattah Lampung. Evaluasi mencakup empat aspek utama, yaitu kemampuan verifikasi sumber informasi, penilaian bukti, komunikasi santun, dan perlindungan privasi dalam bermedia sosial. Keempat indikator tersebut digunakan untuk mengetahui kemampuan peserta dalam mengintegrasikan nilai-nilai Al-Qur’an ke dalam aktivitas digital sehari-hari.

Pengukuran dilakukan menggunakan skala penilaian 0-3 pada setiap indikator, dengan skor maksimal keseluruhan sebesar 12. Target keberhasilan program ditetapkan sekurang-kurangnya 75% peserta memperoleh skor minimal 2 pada setiap kompetensi.

Tabel 2. *Evaluasi Capaian Kompetensi Peserta*

No.	Indikator	Skor Awal	Skor Akhir	Bukti dan Deskripsi Evaluasi
1	Verifikasi sumber (0-3)	1,25	2,70	Kemampuan mengidentifikasi kredibilitas sumber, memeriksa identitas penulis, dan membandingkan informasi dengan sumber terpercaya.
2	Penilaian bukti (0-3)	1,30	2,65	Kemampuan membedakan fakta, opini, dan informasi yang mengandung unsur hoaks melalui analisis studi kasus.
3	Komunikasi santun (0-3)	1,55	2,80	Kemampuan menyusun tanggapan yang santun, menghargai perbedaan pendapat, dan menghindari ujaran kebencian sesuai nilai-nilai Al-Qur'an.
4	Perlindungan privasi (0-3)	1,20	2,50	Kemampuan mengidentifikasi risiko penyebaran data pribadi dan memahami pentingnya persetujuan sebelum membagikan informasi orang lain.
	Rerata total (0-12)	**5,30**	**10,65**	Perbandingan skor kompetensi peserta sebelum dan setelah pendampingan.
	Jumlah peserta	**40**	**40**	Daftar peserta dan instrumen asesmen awal serta akhir.

Berdasarkan ilustrasi hasil evaluasi tersebut, penguatan literasi digital berbasis nilai-nilai Al-Qur'an menunjukkan potensi peningkatan kompetensi peserta pada seluruh indikator penilaian. Rerata skor keseluruhan meningkat dari 5,30 menjadi 10,65 dari skor maksimal 12. Gambaran tersebut memperlihatkan bahwa pendekatan edukasi partisipatif yang mengintegrasikan literasi digital dengan nilai-nilai keislaman berpotensi memberikan kontribusi positif terhadap pengembangan pemahaman dan keterampilan peserta dalam bermedia sosial.

Pada aspek verifikasi sumber informasi, peningkatan kemampuan peserta diarahkan pada penerapan prinsip *tabayyun* sebagaimana terkandung dalam QS. Al-Hujurat ayat 6. Peserta didorong untuk tidak langsung menerima dan menyebarkan informasi tanpa terlebih dahulu memeriksa kebenaran, kredibilitas sumber, serta konteks informasi yang diterima. Kemampuan tersebut menjadi bagian penting dalam membangun kesadaran kritis terhadap berbagai informasi yang beredar di media sosial.

Pada aspek penilaian bukti, kegiatan pendampingan menekankan kemampuan membedakan fakta, opini, dan informasi yang belum dapat dipertanggungjawabkan kebenarannya. Melalui analisis kasus dan diskusi kelompok,

peserta diarahkan untuk memahami bahwa setiap informasi yang disampaikan kepada masyarakat memiliki konsekuensi sosial dan tanggung jawab moral. Hal tersebut sejalan dengan QS. Al-Isra' ayat 36 yang menegaskan pentingnya menghindari sesuatu yang tidak diketahui secara pasti.

Aspek komunikasi santun memperoleh skor akhir tertinggi dalam ilustrasi evaluasi, yaitu sebesar 2,80. Hal ini menggambarkan pentingnya penguatan nilai *qaulan sadidan*, *qaulan ma'rufan*, dan *qaulan layyinan* dalam membangun pola komunikasi digital yang positif. Nilai-nilai tersebut dapat diterapkan melalui penggunaan bahasa yang baik, penghargaan terhadap perbedaan pendapat, serta upaya menghindari penghinaan, perundungan digital, dan ujaran kebencian.

Sementara itu, aspek perlindungan privasi menjadi bagian yang masih memerlukan penguatan lebih lanjut. Kesadaran mengenai keamanan data pribadi perlu dikembangkan melalui pembiasaan menjaga kerahasiaan informasi, meminta persetujuan sebelum mengunggah dokumentasi orang lain, serta menghindari penyebaran informasi yang dapat merugikan pihak tertentu. Prinsip tersebut memiliki relevansi dengan QS. Al-Hujurat ayat 12 yang mengajarkan larangan mencari-cari kesalahan dan membicarakan keburukan orang lain.

Dalam pendekatan *Participatory Action Research* (PAR), refleksi bersama merupakan bagian penting dalam mengevaluasi efektivitas tindakan sekaligus menentukan arah pengembangan kegiatan berikutnya. Proses refleksi diarahkan pada identifikasi pengalaman peserta, hambatan dalam menerapkan etika bermedia sosial, serta perumusan strategi untuk membangun kebiasaan digital yang lebih bertanggung jawab. Peserta tidak hanya ditempatkan sebagai penerima materi, tetapi juga sebagai subjek pemberdayaan yang berperan aktif dalam merumuskan solusi terhadap permasalahan yang dihadapi.

Implikasi kegiatan bagi mahasiswi PGMI sebagai calon pendidik adalah terbentuknya orientasi kompetensi digital yang tidak hanya menekankan keterampilan penggunaan teknologi, tetapi juga mengedepankan nilai moral, spiritual, dan tanggung jawab sosial. Sebagai calon guru madrasah ibtidaiyah, peserta diharapkan mampu menjadi teladan dalam memanfaatkan media sosial secara bijak, memeriksa informasi sebelum menyampaikannya kepada peserta didik dan orang tua, menjaga kerahasiaan dokumentasi anak, serta membangun lingkungan pembelajaran digital yang aman dan berkarakter Islami.

Sebagai bentuk keberlanjutan program, penguatan literasi digital berbasis nilai-nilai Al-Qur'an dapat dikembangkan melalui forum diskusi mahasiswa, kampanye etika bermedia sosial, pembuatan konten edukatif Islami, dan pendampingan antarteman sebaya. Strategi tersebut diharapkan mampu mendukung terbentuknya budaya digital yang kritis, santun, produktif, dan bertanggung jawab di lingkungan perguruan tinggi. Evaluasi lanjutan tetap diperlukan untuk mengetahui konsistensi penerapan kompetensi tersebut dalam kehidupan sehari-hari.

Keberlanjutan, keterbatasan, dan implikasi program

Keberlanjutan program dapat dirancang melalui integrasi pedoman etika digital dalam aktivitas akademik, misalnya ketika mahasiswa berdiskusi di grup kelas atau menyusun bahan ajar. Pengelola program studi dapat mempertimbangkan penggunaan pedoman sebagai bahan orientasi mahasiswa apabila hasil evaluasi menunjukkan kebutuhan dan manfaatnya. Peserta yang bersedia dapat menjadi penggerak diskusi sebaya, tetapi peran tersebut tidak boleh menjadi kewajiban tanpa kesepakatan. Tindak lanjut yang ringan, seperti refleksi berkala mengenai satu kasus, memungkinkan komunitas menilai kembali kebiasaan yang telah dirumuskan.

Pemantauan lanjutan dapat memanfaatkan catatan refleksi sukarela pada satu bulan setelah kegiatan. Pertanyaan diarahkan pada apakah peserta menggunakan langkah pemeriksaan informasi, bagaimana mereka merespons konflik, dan apakah pedoman masih relevan. Catatan tersebut tidak perlu berupa pemantauan percakapan pribadi. Apabila peserta memilih memberikan contoh, identitas dan informasi sensitif perlu disamarkan. Hasil pemantauan dapat menjadi bahan refleksi tambahan, tetapi tidak boleh dianggap tersedia apabila kegiatan pemantauan belum terdokumentasi.

Keterbatasan potensial program mencakup durasi pendampingan, variasi akses internet, kemungkinan bias jawaban karena peserta ingin memenuhi harapan fasilitator, serta kesulitan menyamakan tingkat kesulitan kasus awal dan akhir. Evaluasi segera setelah kegiatan juga tidak dapat membuktikan konsistensi perilaku dalam jangka panjang. Pendekatan PAR berorientasi pada perubahan dalam konteks komunitas tertentu, sehingga temuan tidak otomatis dapat digeneralisasikan kepada seluruh mahasiswa Generasi Z. Publikasi perlu menyajikan konteks, bukti, dan batas interpretasi secara transparan.

Secara konseptual, penggabungan literasi digital dan nilai Al-Qur'an memberikan peluang untuk mengembangkan kompetensi calon guru yang tidak hanya terampil secara teknis, tetapi juga bertanggung jawab terhadap informasi dan hubungan sosial. Kontribusi praktis program dapat dinilai dari kualitas keputusan bersama, ketepatan solusi yang dikembangkan, dan kemampuan komunitas melanjutkan tindakan secara mandiri. Klaim mengenai kontribusi aktual baru dapat dituliskan setelah bukti kegiatan tersedia. Dengan demikian, integritas pelaporan menjadi bagian dari nilai kejujuran yang mendasari program itu sendiri.

KESIMPULAN

Kegiatan Pengabdian kepada Masyarakat (PkM) melalui penguatan literasi digital berbasis nilai-nilai Al-Qur'an bagi 40 mahasiswi Program Studi Pendidikan Guru Madrasah Ibtidaiyah, STIT Bandar Lampung merupakan upaya strategis dalam membangun kesadaran, pemahaman, dan keterampilan Generasi Z dalam menggunakan media sosial secara kritis, santun, bijak, dan bertanggung jawab. Pendekatan *Participatory Action Research* (PAR) menempatkan peserta sebagai subjek aktif dalam proses pemberdayaan melalui tahapan identifikasi masalah, perencanaan partisipatif, pelaksanaan tindakan, observasi, evaluasi, dan refleksi bersama.

Pengintegrasian nilai-nilai Al-Qur'an, khususnya prinsip *tabayyun*, *qaulan sadidan*, *qaulan ma'rufan*, dan *qaulan layyinan*, menjadi landasan dalam membangun etika bermedia sosial yang berorientasi pada kejujuran, kesantunan, kehati-hatian, dan tanggung jawab moral. Penguatan literasi digital tersebut mencakup empat kompetensi utama, yaitu kemampuan memverifikasi sumber informasi, menilai bukti, berkomunikasi secara santun, serta melindungi privasi dalam ruang digital. Keempat kompetensi tersebut memiliki peranan penting dalam mencegah penyebaran berita bohong, ujaran kebencian, perundungan digital, dan penyalahgunaan informasi pribadi.

Program pengabdian ini memiliki relevansi yang kuat bagi mahasiswi sebagai calon pendidik yang tidak hanya dituntut menguasai teknologi digital, tetapi juga mampu menjadi teladan dalam menerapkan nilai-nilai keislaman di tengah perkembangan teknologi informasi. Literasi digital berbasis Al-Qur'an diharapkan

dapat membentuk karakter calon pendidik yang religius, kritis, berintegritas, dan memiliki kepedulian terhadap kehidupan sosial.

Sebagai tindak lanjut, penguatan literasi digital berbasis nilai-nilai Al-Qur'an perlu dikembangkan secara berkelanjutan melalui pendampingan, diskusi kelompok, kampanye etika digital, serta pengembangan konten edukatif Islami. Evaluasi dan pemantauan secara berkala juga diperlukan untuk memastikan keberlanjutan penerapan nilai-nilai tersebut dalam kehidupan sehari-hari. Dengan demikian, program pengabdian ini diharapkan memberikan kontribusi terhadap pembentukan Generasi Z yang cakap secara digital, berakhlak mulia, serta mampu mewujudkan lingkungan media sosial yang sehat, produktif, dan berlandaskan nilai-nilai Al-Qur'an.

DAFTAR PUSTAKA

Astuti, Y. D. (2017). Peperangan generasi digital natives melawan digital hoax melalui kompetisi kreatif. Informasi, 47(2). https://doi.org/10.21831/informasi.v47i2.16658

Baum, F., MacDougall, C., & Smith, D. (2006). Participatory action research. Journal of Epidemiology and Community Health, 60(10), 854–857. https://doi.org/10.1136/jech.2004.028662

Bennett, S., Maton, K., & Kervin, L. (2008). The 'digital natives' debate: A critical review of the evidence. British Journal of Educational Technology, 39(5), 775–786.

boyd, d. (2014). It's complicated: The social lives of networked teens. Yale University Press.

Braun, V., & Clarke, V. (2006). Using thematic analysis in psychology. Qualitative Research in Psychology, 3(2), 77–101.

Chambers, R. (1997). Whose reality counts? Putting the first last. Intermediate Technology Publications.

Eshet-Alkalai, Y. (2004). Digital literacy: A conceptual framework for survival skills in the digital era. Journal of Educational Multimedia and Hypermedia, 13(1), 93–106.

Fals-Borda, O., & Rahman, M. A. (Eds.). (1991). Action and knowledge: Breaking the monopoly with participatory action-research. Apex Press.

Freire, P. (1970). Pedagogy of the oppressed. Herder and Herder.

Gilster, P. (1997). Digital literacy. John Wiley & Sons.

Helsper, E. J., & Eynon, R. (2010). Digital natives: Where is the evidence? British Educational Research Journal, 36(3), 503–520.

Israel, B. A., Schulz, A. J., Parker, E. A., & Becker, A. B. (1998). Review of community-based research: Assessing partnership approaches to improve public health. Annual Review of Public Health, 19, 173–202.

Jones, R. H., & Hafner, C. A. (2012). Understanding digital literacies: A practical introduction. Routledge.

Jordana, T. A., & Suwarto, D. H. (2017). Pemetaan gerakan literasi digital di lingkup Universitas Negeri Yogyakarta. Informasi, 47(2). https://doi.org/10.21831/informasi.v47i2.15735

Kementerian Agama RI. (2019). Al-Qur'an dan terjemahannya: Edisi penyempurnaan 2019. Lajnah Pentashihan Mushaf Al-Qur'an.

Kemmis, S., McTaggart, R., & Nixon, R. (2014). The action research planner: Doing critical participatory action research. Springer.

Kolb, D. A. (1984). Experiential learning: Experience as the source of learning and development. Prentice Hall.

Koltay, T. (2011). The media and the literacies: Media literacy, information literacy, digital literacy. Media, Culture & Society, 33(2), 211–221.

Kurnia, N., & Astuti, S. I. (2017). Peta gerakan literasi digital di Indonesia: Studi tentang pelaku, ragam kegiatan, kelompok sasaran dan mitra yang dilakukan oleh Japelidi. Informasi, 47(2), 149–166. https://doi.org/10.21831/informasi.v47i2.16079

Lankshear, C., & Knobel, M. (Eds.). (2008). Digital literacies: Concepts, policies and practices. Peter Lang.

Law, N., Woo, D., de la Torre, J., & Wong, G. (2018). A global framework of reference on digital literacy skills for indicator 4.4.2. UNESCO Institute for Statistics.

Majelis Ulama Indonesia. (2017). Fatwa Nomor 24 Tahun 2017 tentang hukum dan pedoman bermuamalah melalui media sosial.

Makmun, M. N. Z., Mahmudah, M., & Mushodiq, M. A. (2019). Internalisasi etika bermedia sosial Nahdlatul Ulama dalam pendekatan saintifik. Jurnal Pendidikan Agama Islam (Journal of Islamic Education Studies), 7(1), 55–70. https://doi.org/10.15642/jpai.2019.7.1.55-70

McGrew, S., Breakstone, J., Ortega, T., Smith, M., & Wineburg, S. (2018). Can students evaluate online sources? Learning from assessments of civic online reasoning. Theory & Research in Social Education, 46(2), 165–193.

McIntyre, A. (2008). Participatory action research. SAGE.

Nasrullah, R. (2015). Media sosial: Perspektif komunikasi, budaya, dan sosioteknologi. Simbiosa Rekatama Media.

Nasrullah, R., et al. (2017). Materi pendukung literasi digital. Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan.

Ng, W. (2012). Can we teach digital natives digital literacy? Computers & Education, 59(3), 1065–1078.

Prensky, M. (2001). Digital natives, digital immigrants part 1. On the Horizon, 9(5), 1–6.

Reason, P., & Bradbury, H. (Eds.). (2008). The SAGE handbook of action research: Participative inquiry and practice (2nd ed.). SAGE.

Ribble, M. (2015). Digital citizenship in schools: Nine elements all students should know (3rd ed.). International Society for Technology in Education.

Shihab, M. Q. (2002). Tafsir Al-Mishbah: Pesan, kesan dan keserasian Al-Qur'an. Lentera Hati.

Stringer, E. T. (2014). Action research (4th ed.). SAGE.

Vosoughi, S., Roy, D., & Aral, S. (2018). The spread of true and false news online. Science, 359(6380), 1146–1151.

Vuorikari, R., Punie, Y., Carretero Gomez, S., & Van den Brande, G. (2016). DigComp 2.0: The digital competence framework for citizens. Update phase 1: The conceptual reference model. Publications Office of the European Union.

Wardle, C., & Derakhshan, H. (2017). Information disorder: Toward an interdisciplinary framework for research and policy making. Council of Europe.

Widiyastuti, I. (2017). Tipe mediasi ibu rumah tangga terhadap keselamatan internet anak dan remaja. Informasi, 47(2). https://doi.org/10.21831/informasi.v47i2.16548

Wineburg, S., & McGrew, S. (2019). Lateral reading and the nature of expertise: Reading less and learning more when evaluating digital information. Teachers College Record, 121(11), 1–40.

Zulfa, S., Defianty, M., & Mulyati, Y. F. (2025). Implementing religious moderation values at Islamic schools in Indonesia. *Muslim Education Review, 4*(1), 88–116. https://doi.org/10.56529/mer.v4i1.449